TAXEN

Ensiklopedia Pajak Internal Perum Jasa Tirta II

Buku Panduan Penggunaan

Dari pertanyaan sederhana sampai angka yang dibayarkan.
Menuntun, bukan sekadar menghitung.

14	53	168
menu dalam satu aplikasi	pekerjaan yang dikenali	kode objek pajak

Tim Pajak, Divisi Keuangan dan Akuntansi
Perum Jasa Tirta II · September 2026

@2026 · TaxEn By. Lis

Daftar Isi

1 Pendahuluan 3

1.1 Apa itu TaxEn 3

1.2 Mengapa aplikasi ini diperlukan 3

2 Cara Membuka Aplikasi 4

2.1 Dari portal Helpdesk Jasatirta2 4

2.2 Dua tampilan, satu mesin hitung 4

3 Mengenal Bagian Aplikasi 5

4 Cari Pasal dan Cek NPWP 7

4.1 Menentukan rekanan 7

4.2 Menentukan pekerjaan 7

4.3 Membaca hasil 8

4.4 Hasil menurut identitas rekanan 9

4.5 Mengunduh hasil sebagai PDF 10

5 Cek Penerimaan Pendapatan 11

5.1 Kegunaan 11

5.2 Dua pilihan pemakaian 11

5.3 Cara mengisi 12

5.4 Membaca hasil penelusuran 12

6 Kalkulator Per Pasal 14

6.1 PPh Pasal 21 14

6.2 PPh Pasal 22 14

6.3 PPh Pasal 23 15

6.4 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 15

6.5 PPN dan nilai kontrak 16

6.6 Pembagian termin 17

6.7 Uang muka 19

7 Menu Referensi 21

7.1 Cek pemungut PPN 21

7.2 Kode objek pajak 21

7.3 Lingkup jasa konstruksi 22

7.4 Cek pembayaran kontrak 23

7.5 Dasar hukum, tabel TER, dan riwayat 24

8 Hal yang Perlu Diperhatikan 25

9 Dasar Hukum 25

BAB SATU

1 Pendahuluan

1.1 Apa itu TaxEn

TaxEn adalah aplikasi rujukan dan penghitung pajak yang disusun Tim Pajak Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk dipakai seluruh unit kerja di lingkungan Perum Jasa Tirta II. Aplikasi ini menuntun pengguna dari pertanyaan sederhana, yaitu siapa rekanannya dan apa pekerjaannya, sampai memperoleh pasal, tarif, dasar pengenaan, kode objek pajak, dan angka yang harus dibayarkan.

Berbeda dari kalkulator pajak pada umumnya, TaxEn tidak mengharuskan pengguna sudah mengetahui pasal yang berlaku. Justru penentuan pasal itulah yang menjadi bagian tersulit, dan aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikannya lebih dahulu.

1.2 Mengapa aplikasi ini diperlukan

Kekeliruan pemotongan pajak masih sering terjadi, dan sebagian besar bukan karena salah hitung, melainkan karena salah menentukan pasal sejak awal. Delapan kekeliruan yang paling sering ditemui dapat dikelompokkan menurut sisi transaksinya.

1 Saat memotong

Keliru antara PPh 21 dan PPh 23 karena tidak melihat status rekanan. Salah membaca NPWP atau NIK. Keliru antara PPh 23 dan PPh Final 4 ayat (2) untuk konstruksi dan sewa. Salah dasar pengenaan PPh 21, seratus atau lima puluh persen. Memakai DPP PPN untuk menghitung PPh. Kode objek pajak tidak cocok.

2 Saat menerima pembayaran

Pelanggan tidak memotong PPh, baru disadari bertahun kemudian lalu mereka menagih kembali uangnya. Sewa lahan dipotong PPh 23 padahal seharusnya PPh Final 4 ayat (2), kredit pajak terlanjur dipakai sehingga pembetulannya melintasi tahun.

Tujuan aplikasi. Menutup kedelapan titik rawan tersebut sejak langkah pertama, baik dari sisi PJT II sebagai pemotong maupun dari sisi PJT II sebagai pihak yang dipotong.

BAB DUA

2 Cara Membuka Aplikasi

2.1 Dari portal Helpdesk Jasatirta2

Aplikasi tersedia pada portal Helpdesk Jasatirta2 dan dapat dibuka langsung tanpa masuk akun. Tidak ada pemasangan, tidak ada pendaftaran, dan pembaruan berjalan sendiri sehingga pengguna selalu mendapat versi terbaru.

1. Buka alamat **helpdesk.jasatirta2.co.id** melalui peramban.
2. Pada bilah menu di bagian atas, klik **Kamus Pajak**. Menu ini berada di luar menu yang memerlukan akun.
3. Pilih tampilan yang sesuai perangkat, komputer atau telepon genggam.
4. Aplikasi langsung terbuka di peramban dan siap dipakai.

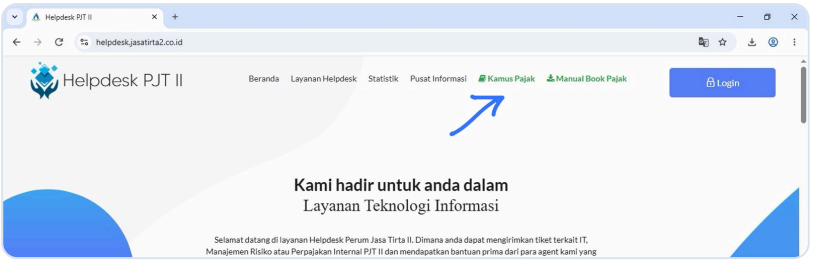

Gambar 1. Portal Helpdesk Jasatirta2, menu Kamus Pajak di bilah atas

2.2 Dua tampilan, satu mesin hitung

Tersedia dua tampilan yang memakai mesin perhitungan yang sama persis. Tampilan yang muncul menyesuaikan perangkat yang dipakai untuk membuka. Yang berbeda hanya susunan menu dan cara menampilkan hasil.

Hal	Komputer	Telepon genggam
Letak menu	di sisi kiri layar	di bilah bawah layar
Isian dan hasil	berdampingan	hasil di bawah isian
Ukuran tombol	ukuran biasa	lebih besar, mudah disentuh
Paling sesuai	pekerjaan di meja	cek cepat di lapangan

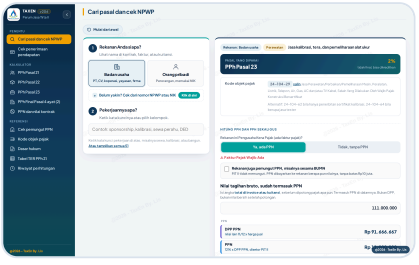

Gambar 2. Tampilan komputer, menu di sisi kiri dengan isian dan hasil berdampingan



Gambar 3. Tampilan telepon genggam, menu di bilah bawah

BAB TIGA

3 Mengenal Bagian Aplikasi

Aplikasi memuat empat belas menu yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok penentu dipakai ketika pasalnya belum diketahui, kelompok kalkulator ketika pasalnya sudah pasti, dan kelompok referensi untuk rujukan.

Kelompok	Menu	Kegunaan
Penentu	Cari pasal dan cek NPWP	Menentukan pasal, tarif, dan kode objek atas suatu pekerjaan
Penentu	Cek penerimaan pendapatan	Menelusuri selisih antara nilai tagihan dan uang yang diterima
Kalkulator	PPh Pasal 21	Menghitung pemotongan atas orang pribadi
Kalkulator	PPh Pasal 22	Menghitung pemungutan atas pembelian barang dan impor
Kalkulator	PPh Pasal 23	Menghitung pemotongan atas jasa dan sewa
Kalkulator	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Menghitung pemotongan yang bersifat final
Kalkulator	PPN dan nilai kontrak	Menghitung PPN, nilai kontrak dari harga RAB, dan pembagian termin
Referensi	Cek pemungut PPN	Memeriksa status pemungut atas rekanan
Referensi	Kode objek pajak	Mencari kode objek pajak untuk Coretax
Referensi	Lingkup jasa konstruksi	Membedakan pekerjaan konstruksi dari jasa PPh Pasal 23
Referensi	Cek pembayaran kontrak	Memeriksa pembayaran kontrak yang sudah berjalan terhadap PPN kontrak
Referensi	Dasar hukum	Menampilkan peraturan yang menjadi acuan
Referensi	Tabel TER PPh 21	Menampilkan tarif efektif rata rata
Referensi	Riwayat perhitungan	Menyimpan hasil hitung pada perangkat pengguna

Mulai dari mana

Belum tahu pasalnya

Buka Cari pasal. Pasal, tarif, sampai angka dibayar, sekaligus.

Sudah tahu pasalnya

Buka kalkulator pasal itu untuk pilihan yang lebih rinci.

Menyusun kontrak

Buka PPN dan nilai kontrak, dari harga RAB dan termin sampai susunan kontraknya.

Kontrak sudah berjalan

Buka Cek pembayaran kontrak, periksa PPN tiap pembayaran terhadap PPN kontrak.

Uang masuk tidak pas

Buka Cek penerimaan pendapatan, telusuri apa yang dipotong pelanggan.

Konstruksi atau bukan

Buka Lingkup jasa konstruksi, batas PPh Final 4 ayat (2) dengan PPh 23.

Perlu rujukan

Kode objek, pemungut PPN, dasar hukum, dan tabel tarif.

BAB EMPAT

4 Cari Pasal dan Cek NPWP

Menu ini menjadi pintu utama aplikasi. Sebagian besar kebutuhan sehari hari dapat diselesaikan di sini, mulai dari penentuan pasal sampai memperoleh angka yang dibayarkan kepada rekanan.

4.1 Menentukan rekanan

Pertanyaan pertama adalah siapa rekanannya, badan usaha atau orang pribadi. Jawaban atas pertanyaan ini menentukan pasal yang berlaku, karena pekerjaan yang sama dapat dikenai pasal yang berbeda tergantung siapa yang mengerjakan.

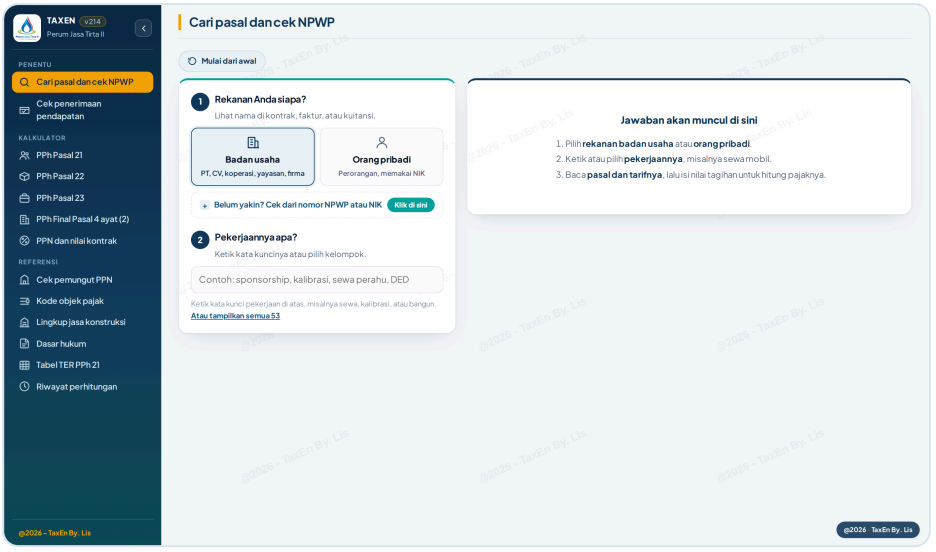

Gambar 4. Tampilan awal menu Cari pasal dan cek NPWP

Apabila belum yakin, tersedia fasilitas pemeriksaan berdasarkan nomor. Klik tautan **Belum yakin, cek dari NPWP atau NIK**, lalu masukkan nomornya. Aplikasi membaca nomor tersebut dengan aturan berikut.

- Diawali angka nol, badan usaha.
- Diawali angka satu lalu nol, badan usaha.
- Diawali angka satu lalu angka selain nol, atau diawali angka dua sampai sembilan, orang pribadi.

4.2 Menentukan pekerjaan

Ketik kata kunci pekerjaannya. Aplikasi menerima istilah sehari hari yang lazim dipakai di lingkungan perusahaan, tidak harus memakai nama resmi objek pajak.

> **Contoh istilah sehari hari.** Kata kalibrasi mengarah ke jasa perawatan dan pemeliharaan. Kata satpam mengarah ke jasa penyedia tenaga kerja. Kata sponsorship mengarah ke penyediaan tempat dan waktu dalam media massa. Kata pagar mengarah ke pekerjaan konstruksi.

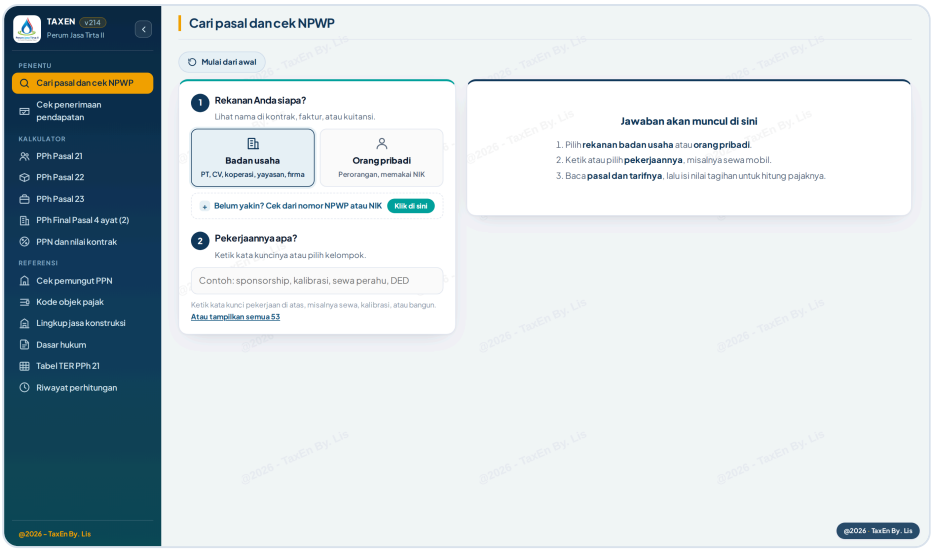

Gambar 5. Hasil pencarian setelah kata kunci diketik

4.3 Membaca hasil

Setelah pekerjaan dipilih, aplikasi menampilkan pasal yang berlaku, tarifnya, kode objek pajak untuk pelaporan pada Coretax, serta keterangan apakah pemotongan tersebut bersifat final atau dapat dikreditkan.

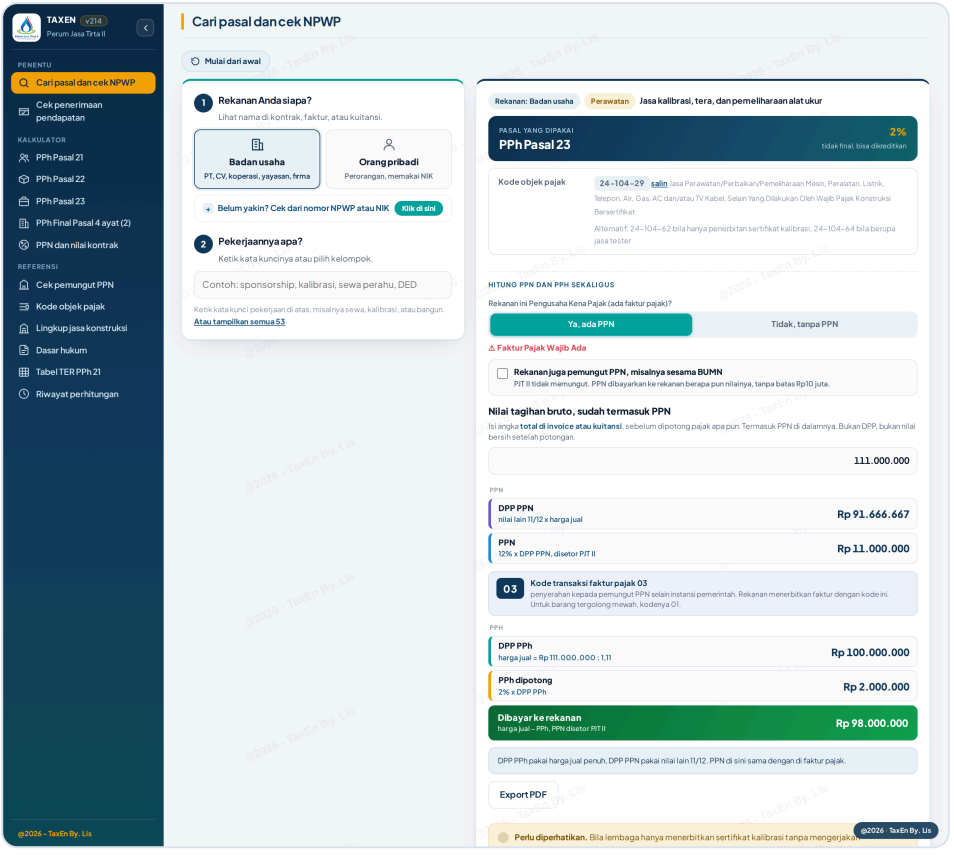

Gambar 6. Hasil lengkap beserta perhitungan PPN dan PPh sekaligus

Membaca bagian perhitungan

- **Nilai tagihan bruto.** Diisi dengan angka total pada invoice atau kuitansi, sebelum dipotong pajak apa pun. Bukan dasar pengenaan pajak, bukan pula nilai bersih setelah potongan.

- **Dasar pengenaan PPN.** Memakai nilai lain sebesar sebelas per dua belas dari harga jual, sesuai PMK 131 Tahun 2024.
- **Dasar pengenaan PPh.** Memakai harga jual penuh, yaitu nilai tagihan dibagi satu koma sebelas apabila tagihan tersebut sudah termasuk PPN.
- **Kode transaksi faktur pajak.** Kode 03 apabila PPN dipungut PJT II, kode 04 apabila tidak dipungut karena memakai dasar pengenaan nilai lain.

> **Perlu diperhatikan.** Dasar pengenaan PPN dan dasar pengenaan PPh berbeda. Kekeliruan yang sering terjadi adalah memakai dasar pengenaan PPN untuk menghitung PPh, sehingga angkanya lebih kecil dari seharusnya.

4.4 Hasil menurut identitas rekanan

Nilai tagihan yang sama dapat menghasilkan pasal dan angka yang berbeda, tergantung identitas rekanannya. Gambar berikut memperlihatkan hasil untuk rekanan orang pribadi atas pekerjaan yang sama, yang dikenai PPh Pasal 21 dengan dasar pengenaan lima puluh persen dari bruto.

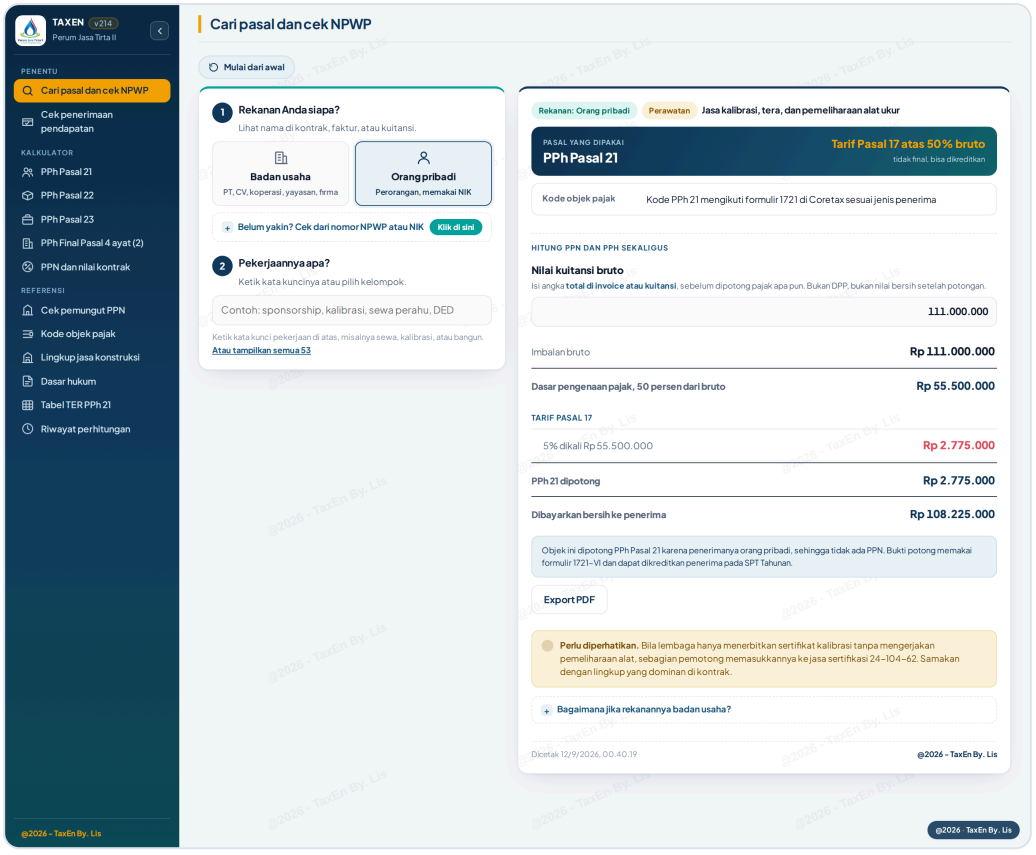

Gambar 7. Hasil untuk rekanan orang pribadi, dikenai PPh Pasal 21

> **Ringkasnya.** Badan usaha dikenai PPh Pasal 23 dua persen atas harga jual. Orang pribadi yang memberi jasa dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 atas lima puluh persen bruto. Peserta kegiatan orang pribadi memakai seratus persen bruto.

4.5 Mengunduh hasil sebagai PDF

Setiap hasil perhitungan dapat diunduh menjadi satu halaman PDF melalui tombol Export PDF. Berkas ini siap dilampirkan pada dokumen pembayaran, karena memuat seluruh unsur yang diperlukan dalam satu lembar.

Yang tercantum di dalamnya

- Kepala berisi logo, nama aplikasi, serta tanggal dan jam pencetakan.
- Identitas rekanan dan nama pekerjaan yang dipilih.
- Pasal yang berlaku beserta tarifnya, dan keterangan apakah bersifat final atau dapat dikreditkan.
- Kode objek pajak untuk pelaporan pada Coretax, lengkap dengan alternatifnya bila ada.
- Rincian PPN, mulai dari dasar pengenaan sampai kode transaksi faktur pajak.
- Rincian PPh, mulai dari dasar pengenaan sampai jumlah yang dipotong.
- Jumlah yang dibayarkan kepada rekanan, ditandai warna hijau.
- Kaki berisi nomor versi aplikasi dan tanggal peninjauan terakhir.

> **Mengapa nomor versi penting.** Nomor versi yang ikut tercetak membuat setiap hasil dapat ditelusuri sampai ke versi aplikasi yang menghasilkannya. Apabila kelak ada ketentuan yang berubah, mudah diketahui berkas mana yang perlu diperiksa ulang.

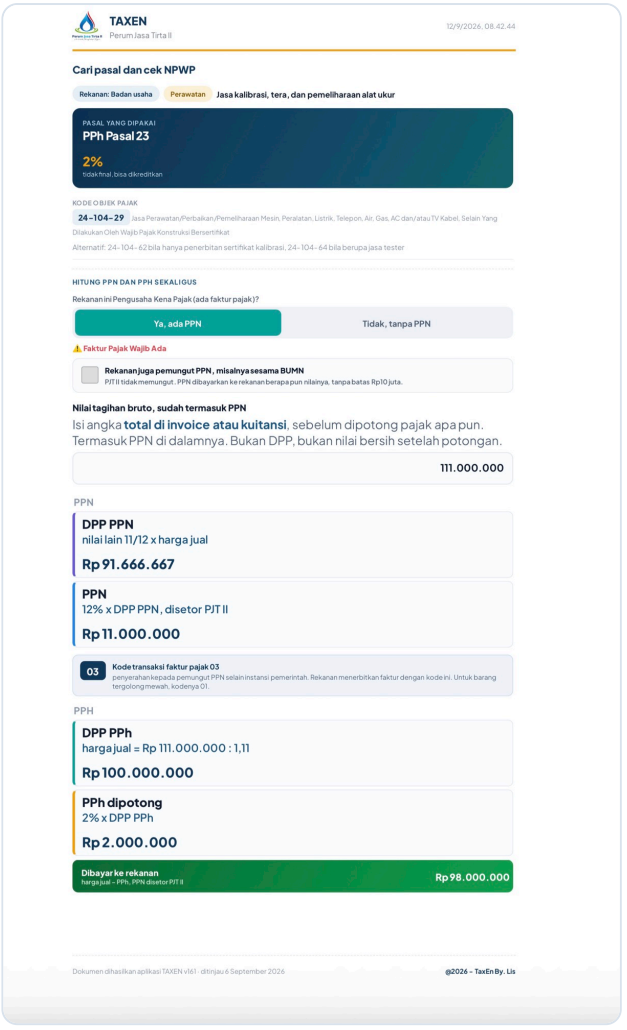

Gambar 8. Contoh hasil Export PDF dari menu Cari pasal

BAB LIMA

5 Cek Penerimaan Pendapatan

5.1 Kegunaan

Menu ini membalik sudut pandang. Menu lain melihat PJT II sebagai pihak yang memotong, sedangkan menu ini melihat PJT II sebagai pihak yang dipotong oleh pelanggan. Dipakai ketika uang yang masuk ke rekening tidak sama dengan nilai tagihan. Aplikasi memecah selisihnya menjadi komponen yang mungkin, kemudian menandai apabila pemotongan oleh pelanggan tidak sesuai ketentuan.

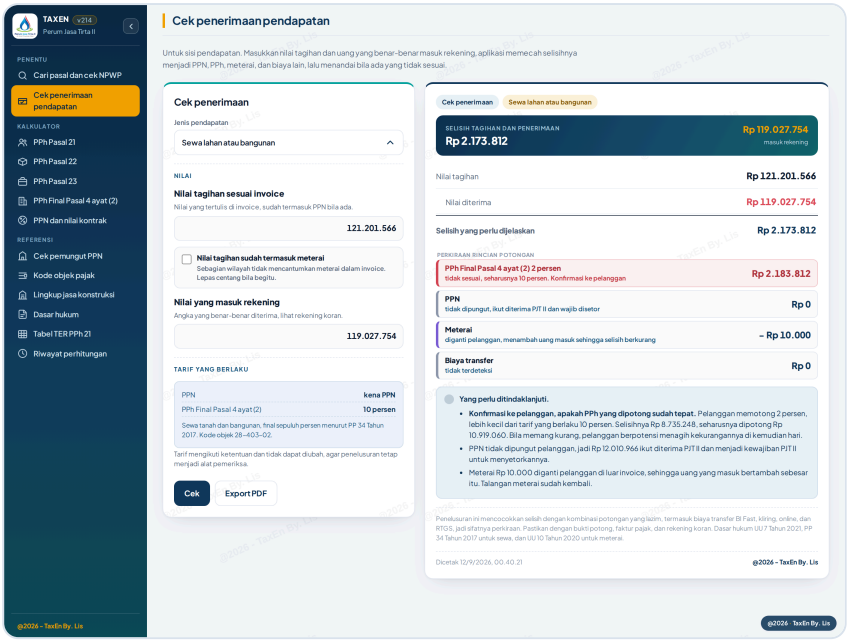

Gambar 9. Penelusuran selisih antara tagihan dan uang yang diterima

5.2 Dua pilihan pemakaian

Menu ini menyediakan dua pilihan yang letaknya di bagian atas isian. Pilihannya disusun menurut waktu, yaitu sebelum uang masuk dan sesudah uang masuk.

Pilihan	Dipakai ketika	Yang diisi
Belum dibayar	Tagihan sudah terbit, uang belum masuk	Jenis pendapatan dan nilai tagihan
Sudah dibayar	Uang sudah masuk dan jumlahnya tidak sesuai tagihan	Ditambah uang yang benar benar masuk rekening

Pilihan Belum dibayar menjawab pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu berapa PPh dan PPN atas suatu tagihan, dan berapa uang yang mestinya masuk. Perhitungannya memakai dua asumsi, yaitu tidak ada biaya transfer dan meterai ditanggung pelanggan.

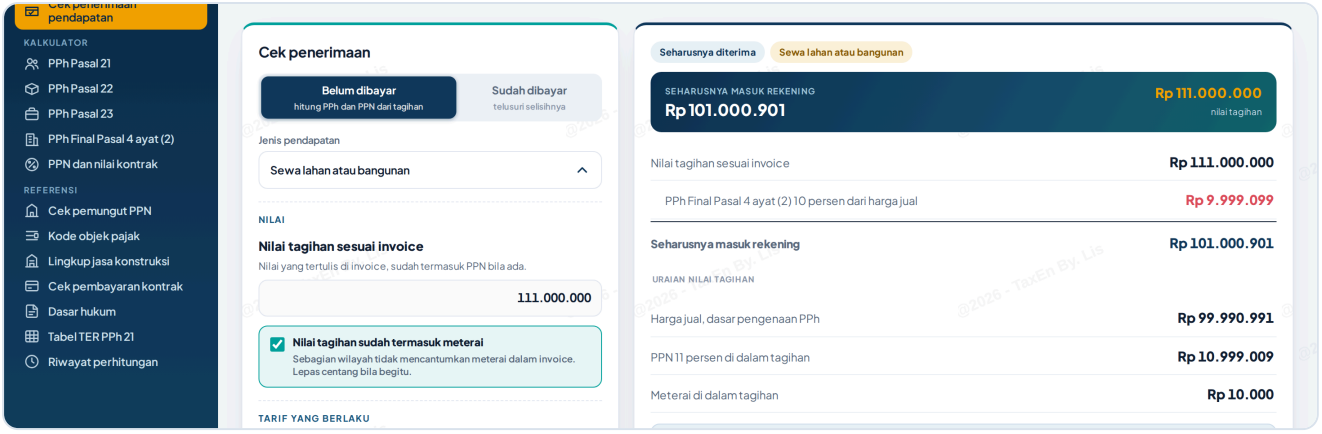

Gambar 10. Pilihan Belum dibayar, dari nilai tagihan ke uang yang seharusnya masuk

Contoh pada gambar. Sewa lahan dengan tagihan Rp111.000.000 yang sudah termasuk PPN dan meterai. Harga jualnya Rp99.990.991, PPN di dalamnya Rp10.999.009, dan meterai Rp10.000. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sepuluh persen dari harga jual sebesar Rp9.999.099 dipotong pelanggan, sehingga yang seharusnya masuk rekening Rp101.000.901.

Khusus air baku. Perlakuan PPh Pasal 23 atas BJPSDA belum seragam, jadi aplikasi menampilkan dua angka sekaligus, yaitu bila dipotong dua persen dan bila tidak dipotong.

5.3 Cara mengisi

1. Pilih jenis pendapatannya. Tersedia air baku, tenaga listrik, sewa lahan atau bangunan, jasa laboratorium, sewa alat berat atau peralatan, dan pendapatan lain lain.
2. Masukkan nilai tagihan sesuai invoice.
3. Tentukan apakah nilai tagihan sudah termasuk meterai. Sebagian wilayah tidak mencantumkan meterai dalam invoice.
4. Masukkan uang yang benar benar masuk ke rekening, dilihat dari rekening koran.

5.4 Membaca hasil penelusuran

Aplikasi menampilkan perkiraan rincian potongan dengan urutan tetap, yaitu PPh, PPN, meterai, dan biaya transfer. PPh didahulukan karena hampir selalu ada, sedangkan pemungutan PPN oleh pelanggan jarang terjadi.

Komponen	Yang perlu diperhatikan
PPh	Apabila tarif yang dipotong tidak sesuai ketentuan, kartunya berwarna merah dan mencantumkan tarif yang seharusnya
PPN	Pemungutan PPN oleh pelanggan tidak umum. Apabila terdeteksi dipungut, mintalah bukti pemungutannya
Meterai	Dapat berupa penggantian oleh pelanggan yang menambah uang masuk, tidak dibayar pelanggan, atau sudah termasuk dalam nilai tagihan
Biaya transfer	Dikenali menurut tarif yang lazim, yaitu BI Fast, kliring, transfer online, dan RTGS

Mengapa perlu ditelusuri sekarang. Apabila pelanggan keliru memotong dan hal itu baru diketahui bertahun kemudian, pembetulannya melintasi tahun pajak sedangkan kredit pajaknya sudah terlanjur dipakai. Penelusuran sejak awal mencegah keadaan tersebut.

Sifat hasil penelusuran. Penelusuran mencocokkan selisih dengan kombinasi potongan yang lazim, sehingga sifatnya perkiraan. Pastikan dengan bukti potong, faktur pajak, dan rekening koran sebelum menyimpulkan.

BAB ENAM

6 Kalkulator Per Pasal

Kalkulator dipakai apabila pasalnya sudah pasti dan kasusnya memerlukan pilihan yang lebih rinci daripada yang tersedia pada menu Cari pasal.

6.1 PPh Pasal 21

Menyediakan enam jenis penerima penghasilan, yaitu tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dewan komisaris, mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun. Tersedia pilihan penghitungan gross dan gross up.

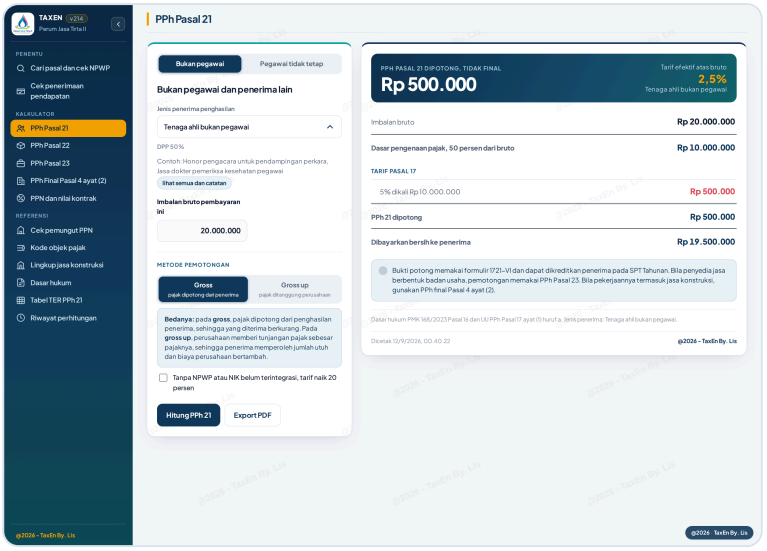

Gambar 11. Kalkulator PPh Pasal 21

Pegawai tidak tetap

Yang menentukan adalah cara upahnya dihitung, bukan kapan upah tersebut dibayarkan. Upah yang dihitung per hari, per minggu, per satuan, atau borongan memakai rata rata upah sehari, walaupun uangnya diserahkan sekaligus pada akhir bulan. Upah yang ditetapkan sekian rupiah sebulan tanpa hitungan hari memakai tarif efektif rata rata bulanan.

Upah rata rata sehari	Perlakuan
sampai dengan Rp450.000	tidak dipotong
di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000	dipotong nol koma lima persen
di atas Rp2.500.000	tarif Pasal 17 atas lima puluh persen upah sehari

6.2 PPh Pasal 22

Dipakai untuk pemungutan atas pembelian barang dan atas impor. Untuk pembelian barang oleh badan usaha milik negara, pemungutan tidak dilakukan apabila dasar pengenaan tidak melebihi sepuluh juta rupiah.

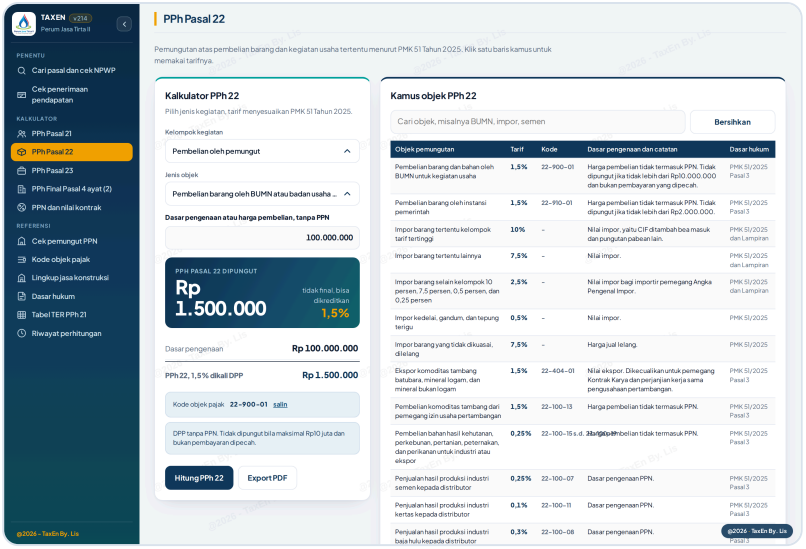

Gambar 12. Kalkulator PPh Pasal 22

6.3 PPh Pasal 23

Memuat kamus enam puluh empat objek, lebih banyak daripada yang tersedia pada menu Cari pasal. Kode objek pajaknya dapat langsung disalin untuk keperluan pelaporan.

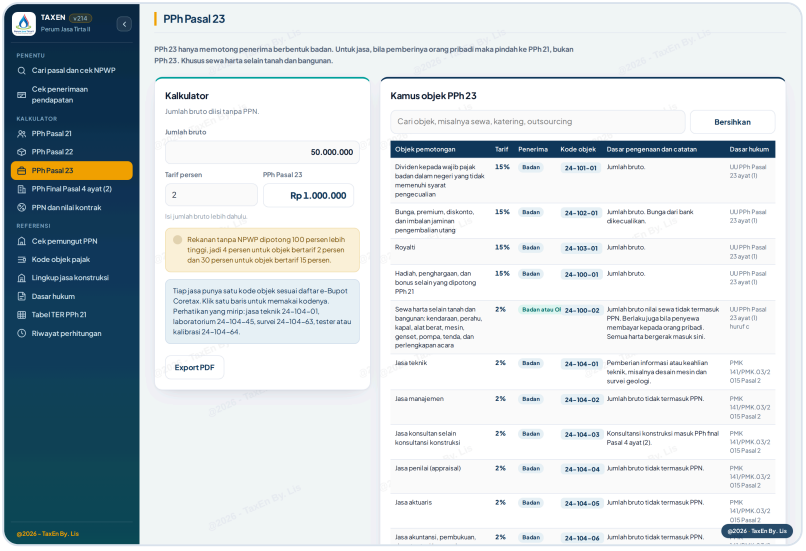

Gambar 13. Kalkulator dan kamus PPh Pasal 23

6.4 PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Dipakai untuk pemotongan yang bersifat final, terutama jasa konstruksi dan sewa tanah dan bangunan. Tarif jasa konstruksi ditentukan oleh sertifikat dan kualifikasi penyedia jasa.

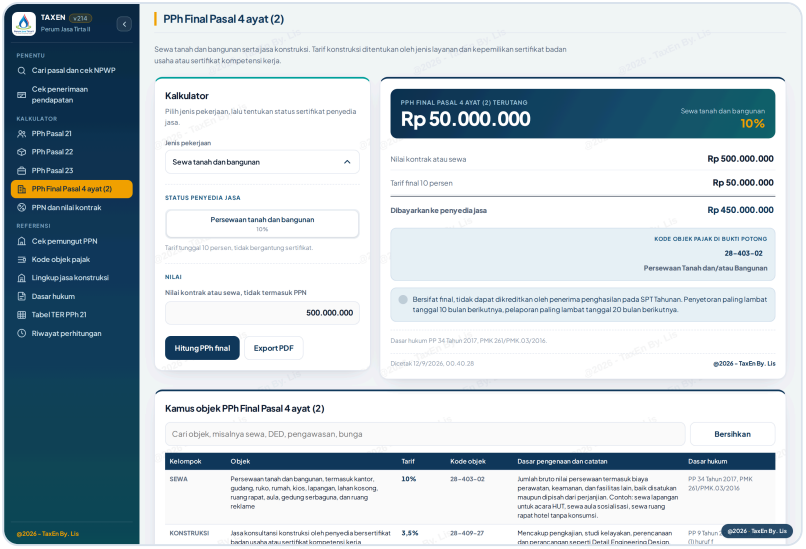

Gambar 14. Kalkulator PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Jenis pekerjaan	Bersertifikat	Tanpa sertifikat
Pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil	1,75%	4%
Pekerjaan konstruksi selain kualifikasi kecil	2,65%	4%
Pekerjaan konstruksi terintegrasi	2,65%	4%
Jasa konsultansi konstruksi	3,5%	6%
Sewa tanah dan atau bangunan	10%	10%

Perlu diperhatikan. Tidak memiliki sertifikat badan usaha tidak memindahkan pekerjaan konstruksi ke PPh Pasal 23. Pekerjaan tersebut tetap dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2), hanya tarifnya menjadi lebih tinggi, yaitu empat persen. Dasar hukumnya PP 9 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1).

6.5 PPN dan nilai kontrak

Menyediakan dua cara pemakaian. Cara pertama menghitung PPN dari nilai transaksi, baik yang sudah termasuk PPN maupun yang belum, lengkap dengan simulasi pembayaran kepada rekanan dan kode transaksi faktur pajaknya.

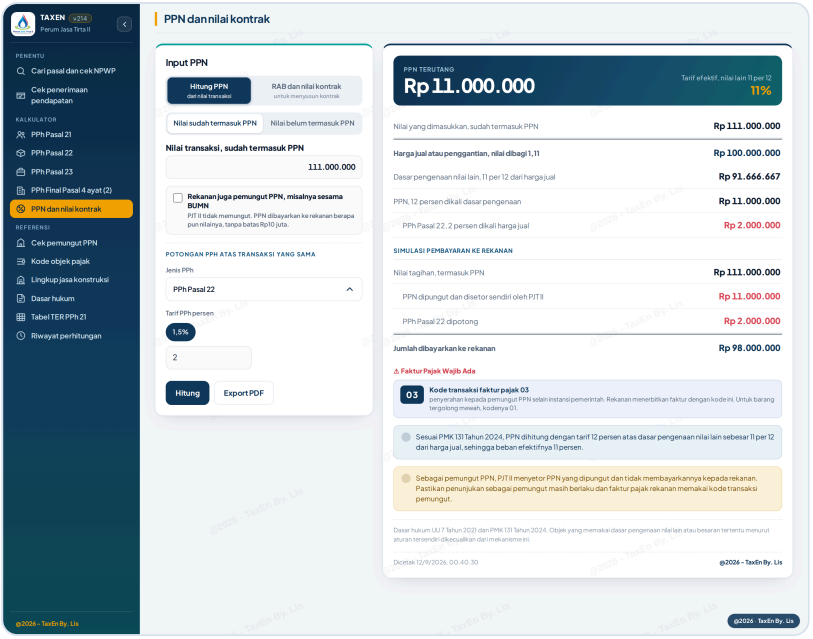

Gambar 15. Perhitungan PPN dan simulasi pembayaran kepada rekanan

Menyusun nilai kontrak dari harga RAB

Cara kedua menyusun nilai kontrak dari harga pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya. Pembulatan dilakukan ke bawah agar tidak melampaui pagu, dan hasilnya berupa susunan yang siap disalin ke dalam kontrak beserta terbilangnya.

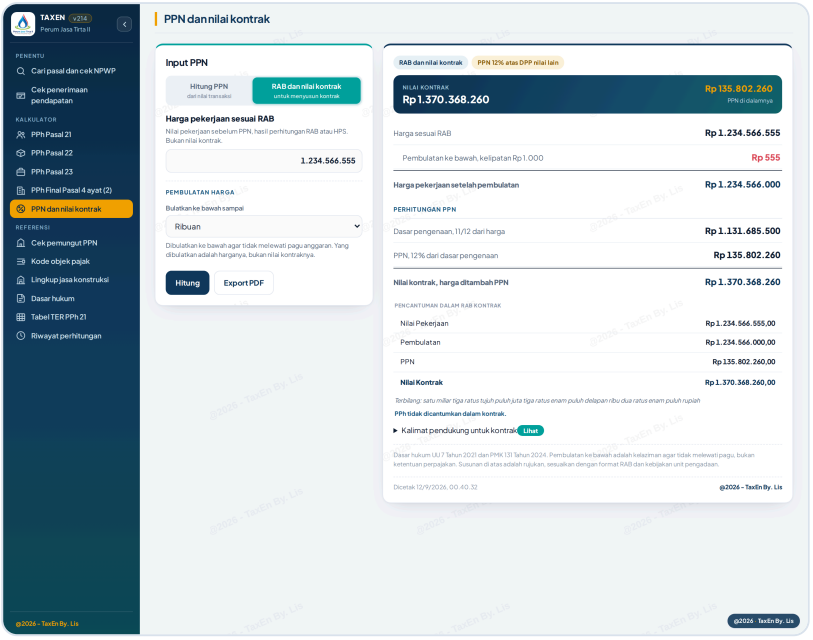

Gambar 16. Penyusunan nilai kontrak dari harga RAB

6.6 Pembagian termin

Pembayaran kontrak sering dibagi menjadi beberapa termin. Isikan jumlah terminnya, lalu persentase tiap termin. Termin terakhir tidak diisi karena selalu mengambil sisa dari seratus persen. Aplikasi menguraikan tiap termin menjadi dasar pengenaan dan PPN, sehingga angkanya siap dipakai saat menagih dan saat membuat faktur pajak.



Rencana Pembayaran per Termin

	PERSENTASE TERMIN	NILAI DPP PEKERJAAN	PPN	NILAI PEMBAYARAN
Termin I	20 %	Rp 246.913.000	Rp 27.160.430	**Rp 274.073.430**
Termin II	75 %	Rp 925.923.750	Rp 101.851.613	**Rp 1.027.775.363**
Termin III sisa	5 %	Rp 61.728.250	Rp 6.790.107 dibulatkan ke bawah	**Rp 68.518.357**
Jumlah	**100 %**	**Rp 1.234.565.000**	**Rp 135.802.150**	**Rp 1.370.367.150**

Gambar 17. Pembagian pembayaran menjadi tiga termin

Contoh pada gambar. Nilai kontrak Rp1.370.367.150 dibagi menjadi 20 persen, 75 persen, dan sisanya 5 persen. Termin I menghasilkan Rp274.073.430 yang sudah bulat, jadi tidak diubah. Termin II dibulatkan ke atas menjadi Rp1.027.775.363 dan Termin III ke bawah menjadi Rp68.518.357. Jumlah ketiganya tetap Rp1.370.367.150.

Aturan pembulatan tiap termin

Persentase termin dikalikan ke nilai kontrak, bukan ke harga pekerjaan, karena yang tercantum di kontrak adalah nilai yang sudah termasuk PPN. Hasil kalinya tidak selalu bulat, dan aplikasi memakai urutan berikut.

Keadaan hasil kali	Perlakuan aplikasi
Sudah bulat	Dipakai apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi
Berdesimal	Termin awal dibulatkan ke atas, termin berikutnya ke bawah, secukupnya sampai jumlahnya kembali pas ke nilai kontrak

PPN yang jatuh tepat setengah rupiah. Sebagian termin menghasilkan PPN berakhiran setengah rupiah. PPN seperti itu boleh dibulatkan ke atas maupun ke bawah, dan aplikasi menandainya dengan tulisan dibulatkan ke bawah pada kolom PPN. Pembulatan ke bawah mengikuti urutan hitung Coretax, yaitu dasar pengenaan nilai lain 11/12 dibulatkan lebih dahulu sebelum dikali dua belas persen. Keduanya sama sahnya, dan yang dipakai harus konsisten dengan faktur pajaknya.

Baris terakhir menyerap selisih pembulatan. Karena tiap termin dibulatkan sendiri sendiri, jumlah dasar pengenaan dan jumlah PPN bisa meleset satu sampai dua rupiah dari yang tercantum di kontrak. Selisih itu ditaruh di baris terakhir dan ditandai tulisan penyeimbang. Nilai pembayaran baris tersebut tidak berubah, yang bergeser hanya pembagian antara dasar pengenaan dan PPN, sehingga PPN baris itu beda beberapa rupiah dari sebelas persen dasar pengenaannya.

Porsi termin dikunci seratus persen. Apabila persentase termin sebelum yang terakhir berjumlah seratus persen atau lebih, tabel berhenti menghitung, kotak isiannya berubah merah, dan tombol Export PDF menolak mencetak. Kurangi dahulu porsinya sampai jumlahnya di bawah seratus persen. Mengubah jumlah termin membuat porsinya dibagi rata ulang.

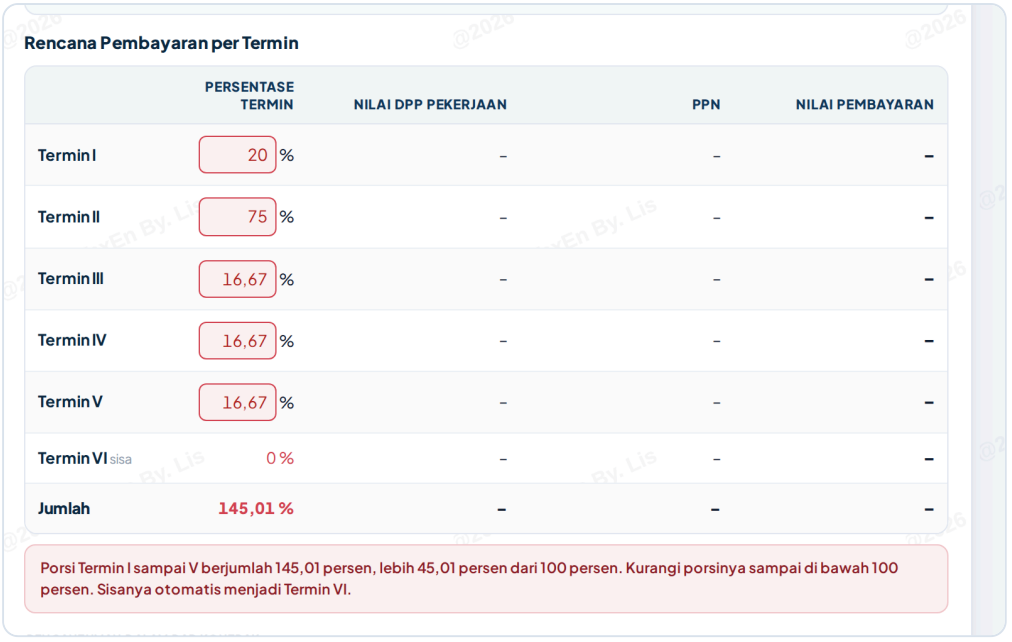

Rencana Pembayaran per Termin

	PERSENTASE TERMIN	NILAI DPP PEKERJAAN	PPN	NILAI PEMBAYARAN
Termin I	20 %	-	-	-
Termin II	75 %	-	-	-
Termin III	16,67 %	-	-	-
Termin IV	16,67 %	-	-	-
Termin V	16,67 %	-	-	-
Termin VI sisa	0 %	-	-	-
Jumlah	145,01 %	-	-	-

Porsi Termin I sampai V berjumlah 145,01 persen, lebih 45,01 persen dari 100 persen. Kurangi porsinya sampai di bawah 100 persen. Sisanya otomatis menjadi Termin VI.

Gambar 18. Porsi termin yang melewati seratus persen, tabel berhenti menghitung

6.7 Uang muka

Uang muka diisi dalam persen dari nilai kontrak, tepat di bawah isian jumlah termin. Pengembaliannya dipotong dari termin, dan tersedia tiga cara, yaitu seluruhnya di Termin I, dibagi dua di Termin I dan Termin II, atau proporsional dengan porsi tiap termin.



Rencana Pembayaran per Termin

	PERSENTASE TERMIN	NILAI DPP PEKERJAAN	PPN	NILAI PEMBAYARAN
Uang muka	20 %	Rp 246.913.000	Rp 27.160.430	**Rp 274.073.430**
Termin I	20 %	Rp 123.456.500	Rp 13.580.215	**Rp 137.036.715** tagihan Rp 274.073.430 uang muka –Rp 137.036.715
Termin II	75 %	Rp 802.467.250	Rp 88.271.398	**Rp 890.738.648** tagihan Rp 1.027.775.363 uang muka –Rp 137.036.715
Termin III sisa	5 %	Rp 61.728.250	Rp 6.790.107 dibulatkan ke bawah	**Rp 68.518.357**
Jumlah	**100 %**	**Rp 1.234.565.000**	**Rp 135.802.150**	**Rp 1.370.367.150**

Gambar 19. Uang muka 20 persen dengan pengembalian dibagi dua termin

Cara membacanya. Baris teratas adalah uang muka beserta dasar pengenaan dan PPN-nya, karena fakturnya memang terbit saat uang muka diterima rekanan. Baris termin di bawahnya berisi nilai bersih setelah dipotong pengembalian, lengkap dengan keterangan nilai tagihan kotor dan besar potongannya. Dengan cara ini PPN tidak dihitung dua kali, dan jumlah seluruh baris tetap sama dengan nilai kontrak.

Bila pengembalian lebih besar dari nilai terminnya. Tabel berhenti menghitung dan menyebutkan termin mana yang bermasalah. Perbesar porsi termin itu, kecilkan uang mukanya, atau pilih cara pengembalian yang dibagi ke beberapa termin.

BAB TUJUH

7 Menu Referensi

7.1 Cek pemungut PPN

Memeriksa apakah suatu rekanan termasuk pemungut PPN. Apabila rekanan juga berstatus pemungut, PJT II tidak melakukan pemungutan dan PPN dibayarkan kepada rekanan berapa pun nilainya, tanpa batas sepuluh juta rupiah.

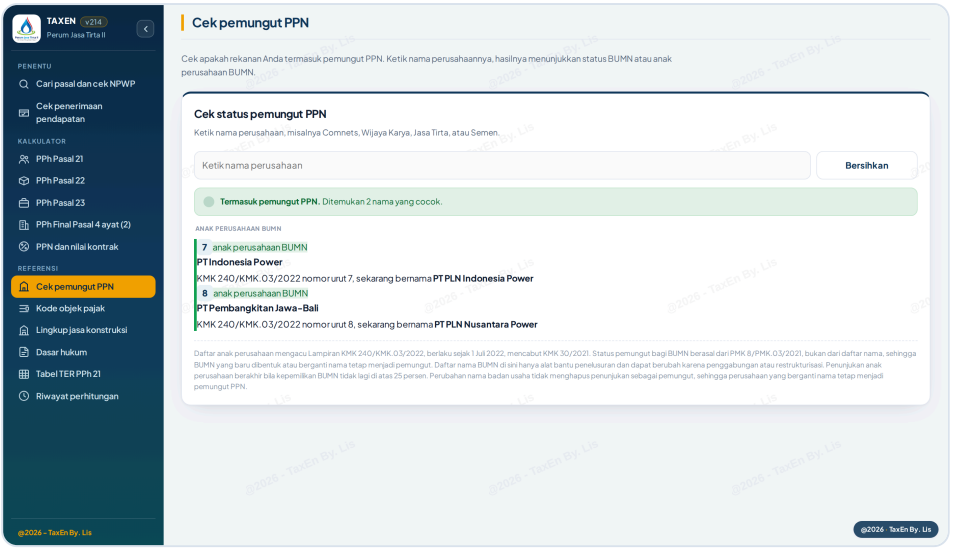

Gambar 20. Pemeriksaan status pemungut PPN

7.2 Kode objek pajak

Memuat seratus enam puluh delapan kode objek pajak. Pencarian menerima istilah sehari hari, sama seperti pada menu Cari pasal, sehingga kata kalibrasi menemukan kode untuk jasa perawatan dan pemeliharaan.

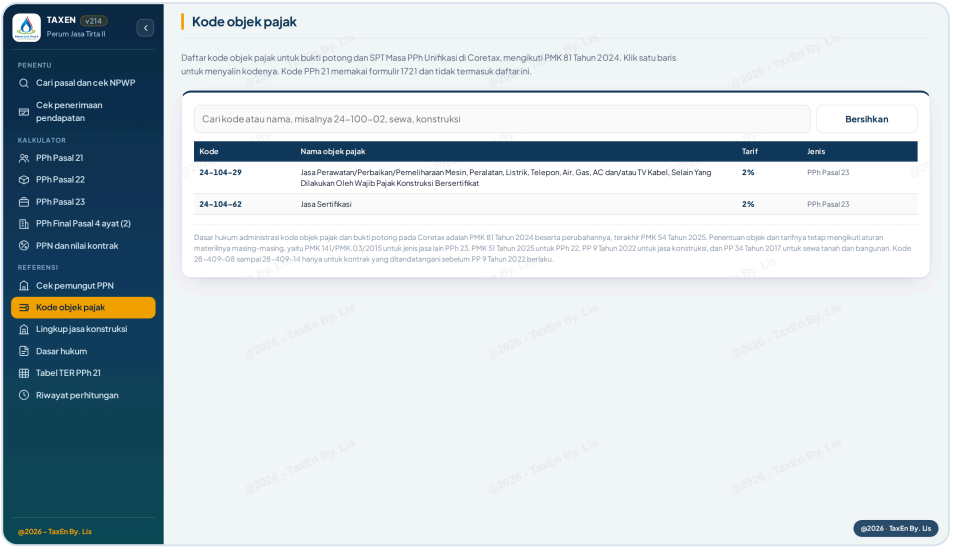

Gambar 21. Pencarian kode objek pajak

7.3 Lingkup jasa konstruksi

Menu ini menjawab pertanyaan yang paling sering menimbulkan keraguan, yaitu apakah suatu pekerjaan termasuk jasa konstruksi atau bukan. Batas tersebut menentukan apakah pekerjaan dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23.

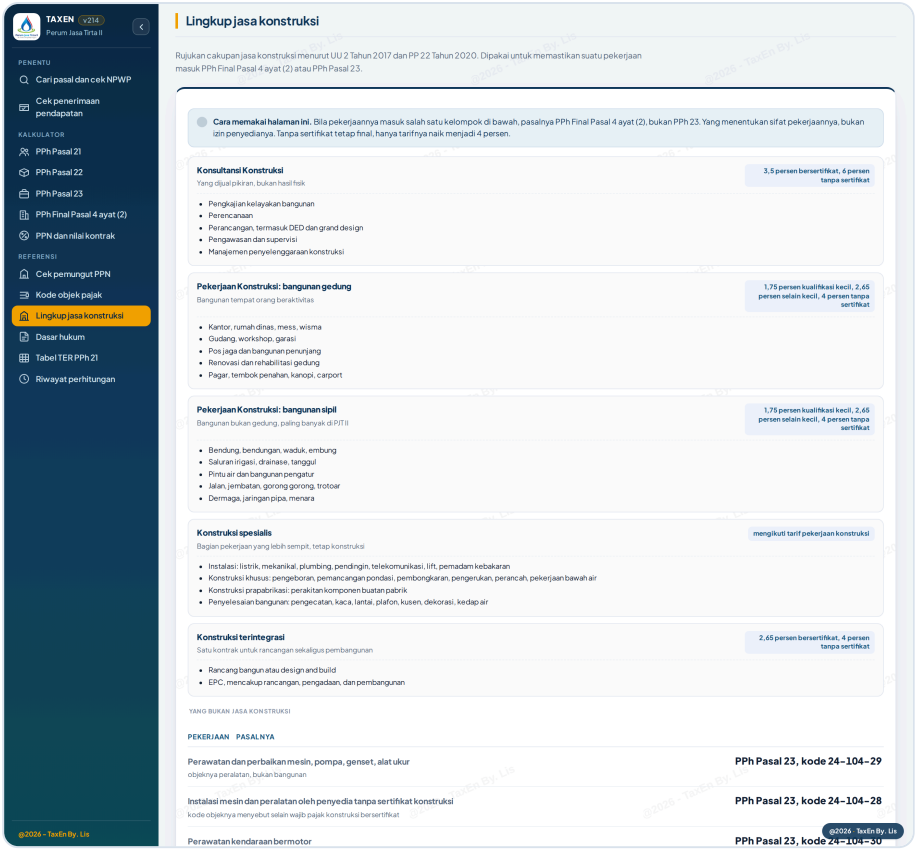

Gambar 22. Lingkup jasa konstruksi beserta pekerjaan yang bukan termasuk di dalamnya

Ringkasan lingkupnya

- **Konsultansi konstruksi.** Pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- **Pekerjaan konstruksi bangunan gedung.** Kantor, rumah dinas, mess, gudang, pos jaga, termasuk renovasi dan pagar.
- **Pekerjaan konstruksi bangunan sipil.** Bendung, bendungan, saluran irigasi, drainase, tanggul, pintu air, jalan, jembatan, dermaga, dan jaringan pipa.
- **Konstruksi spesialis.** Instalasi, konstruksi khusus seperti pengerukan dan pembongkaran, konstruksi prapabrikasi, serta penyelesaian bangunan seperti pengecatan.
- **Konstruksi terintegrasi.** Satu kontrak yang mencakup perancangan sekaligus pembangunan, dikenal sebagai rancang bangun atau EPC.

Yang bukan termasuk jasa konstruksi

Pekerjaan	Pasal yang berlaku
Perawatan dan perbaikan mesin, pompa, genset, alat ukur	PPh Pasal 23, kode 24-104-29
Instalasi mesin dan peralatan oleh penyedia tanpa sertifikat konstruksi	PPh Pasal 23, kode 24-104-28
Perawatan kendaraan bermotor	PPh Pasal 23, kode 24-104-30
Sewa alat berat tanpa operator	PPh Pasal 23, kode 24-100-02
Kajian atau studi yang berdiri sendiri	PPh Pasal 23 jasa teknik
Pengadaan barang tanpa pemasangan	PPh Pasal 22

Batas yang sering keliru. Yang menentukan adalah sifat pekerjaannya, bukan izin penyedianya. Perbaikan jalan, rehabilitasi saluran, pengecatan gedung, dan pengerukan sedimen semuanya konstruksi. Perawatan mesin, pompa, dan alat ukur bukan konstruksi karena objeknya peralatan, bukan bangunan.

7.4 Cek pembayaran kontrak

Dipakai untuk kontrak yang sudah berjalan, bukan yang sedang disusun. Nilai kontraknya diketik langsung dari dokumen kontrak, lalu pembayaran yang sudah dilakukan dicatat satu baris untuk satu kali transfer, walaupun isinya gabungan beberapa termin.

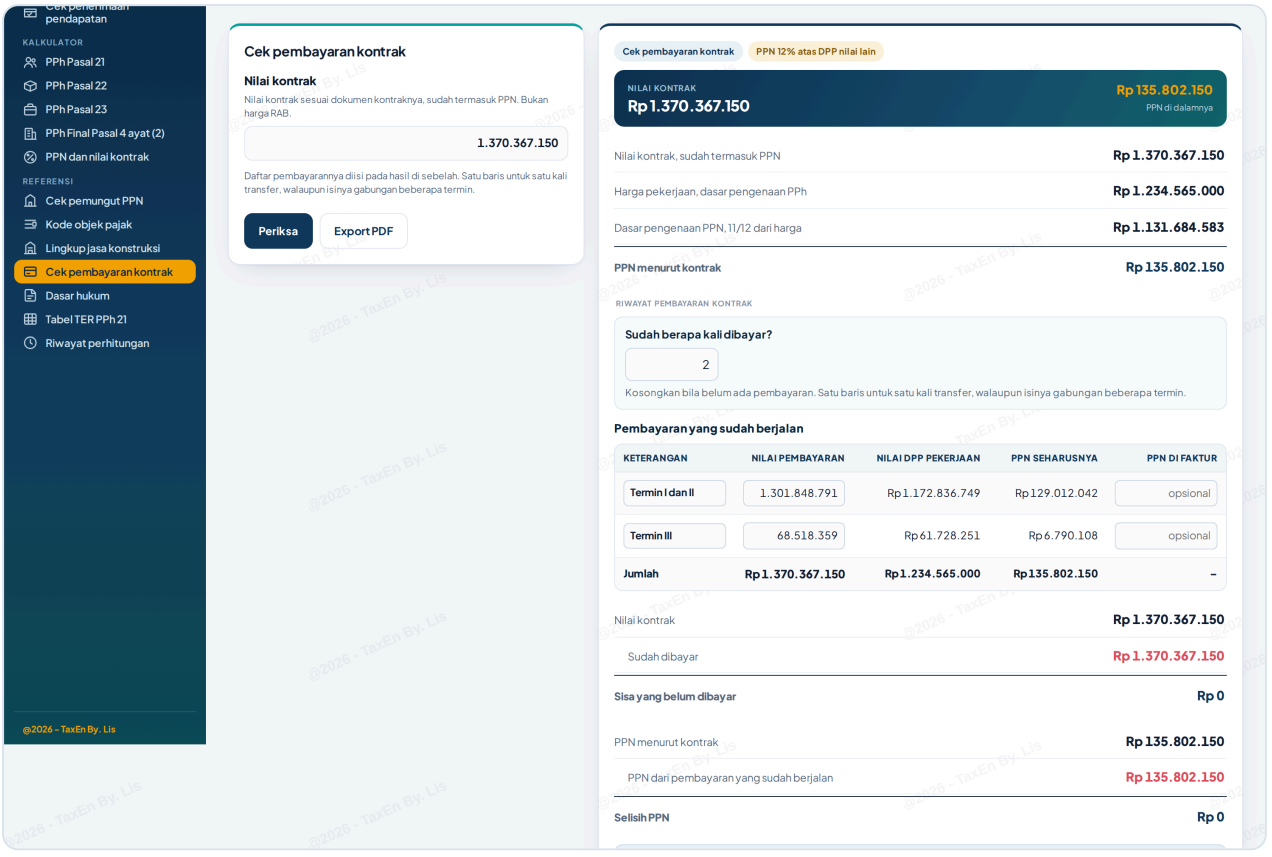

Gambar 23. Pemeriksaan pembayaran kontrak terhadap PPN kontrak

Yang diperiksa

- Tiap pembayaran diurai menjadi dasar pengenaan dan PPN, memakai aturan yang sama dengan pembagian termin.
- Jumlah nilai pembayaran dibandingkan dengan nilai kontrak, lalu ditampilkan sisa yang belum dibayar atau kelebihan bayarnya.
- Jumlah PPN dibandingkan dengan PPN kontrak, lalu ditampilkan PPN yang belum ditagihkan atau selisihnya.
- Kolom PPN di faktur boleh diisi. Bila diisi, angka faktur itulah yang dipakai untuk menghitung PPN yang sudah ditagihkan dan sisa PPN untuk faktur berikutnya, karena angka faktur yang benar benar dibayar dan dilaporkan. Bila berbeda dari hasil hitung, kotaknya berwarna kuning dan disebutkan besar bedanya.
- Selama belum lunas, aplikasi menyebutkan PPN dan DPP yang harus dicantumkan pada faktur berikutnya supaya jumlah seluruh PPN tepat sama dengan PPN kontrak.

> **Contoh pada gambar.** Nilai kontrak Rp1.370.367.150 dibayar dua kali, yaitu Termin I dan II digabung Rp1.301.848.791 lalu Termin III Rp68.518.359. Hasilnya lunas, dan jumlah PPN Rp135.802.150 tepat sama dengan PPN kontrak.

> **Nilai kontrak yang tidak dapat diurai.** Bila nilai kontrak yang diketik tidak punya harga pekerjaan yang bila ditambah PPN kembali persis ke nilai itu, muncul peringatan merah beserta angka terdekat yang benar. Ini menangkap kontrak yang nilainya keliru sejak awal.

7.5 Dasar hukum, tabel TER, dan riwayat

Menu **Dasar hukum** menampilkan peraturan yang menjadi acuan seluruh perhitungan. Menu **Tabel TER PPh 21** menampilkan tarif efektif rata rata bulanan dan harian sesuai PP 58 Tahun 2023. Menu **Riwayat perhitungan** menyimpan hasil pada perangkat pengguna, tidak dikirim ke mana pun.

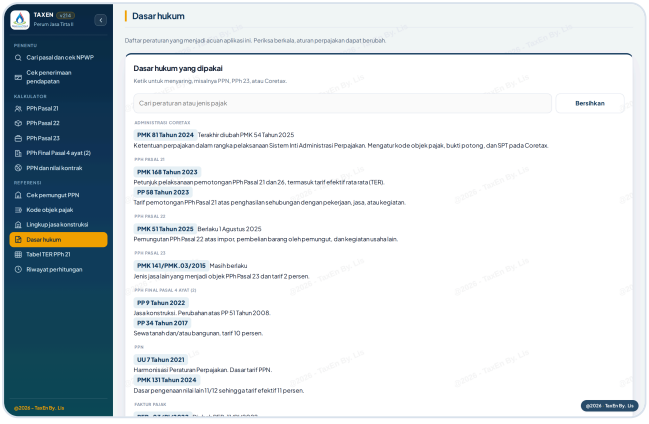

Gambar 24. Daftar dasar hukum

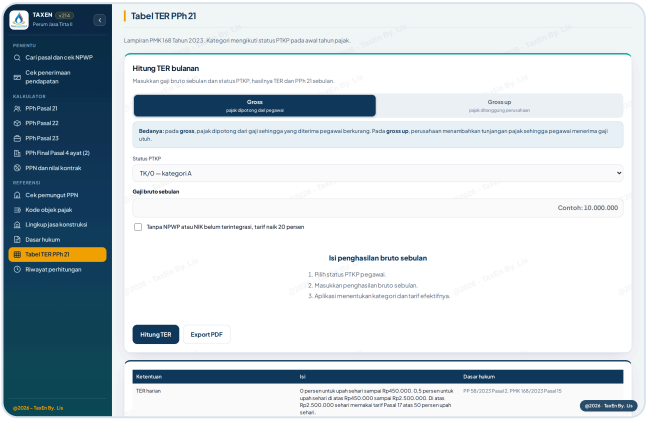

Gambar 25. Tabel tarif efektif rata rata

BAB DELAPAN

8 Hal yang Perlu Diperhatikan

8.1 Sifat aplikasi

TaxEn merupakan alat bantu, bukan pengganti ketentuan perpajakan. Setiap hasil perhitungan tetap perlu diperiksa oleh pengguna, terutama untuk transaksi bernilai besar atau yang tidak lazim.

8.2 Keamanan data

- Seluruh perhitungan berjalan di dalam perangkat pengguna.
- Tidak ada data yang dikirim ke server mana pun.
- Riwayat perhitungan tersimpan pada peramban di perangkat yang bersangkutan.

8.3 Pembaruan

Tim Pajak meninjau aplikasi secara berkala dan setiap kali terdapat ketentuan baru. Versi terbaru diunggah ke portal dan langsung dipakai saat aplikasi dibuka, sehingga pengguna tidak perlu mengunduh ulang. Setiap penerbitan versi baru diumumkan kepada seluruh grup PJT II. Nomor versi ditampilkan di bagian atas layar dan ikut tercetak pada setiap berkas PDF yang dihasilkan.

8.4 Menyampaikan masukan

Apabila ditemukan hasil yang janggal, ketentuan yang sudah berubah, atau istilah pekerjaan yang belum dikenali aplikasi, sampaikan kepada Tim Pajak Divisi Keuangan dan Akuntansi agar segera diperbaiki pada versi berikutnya.

BAB SEMBILAN

9 Dasar Hukum

Peraturan	Mengatur
UU 7 Tahun 2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
PP 58 Tahun 2023	Tarif efektif rata rata PPh Pasal 21
PMK 168 Tahun 2023	Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21
PMK 141 Tahun 2015	Jenis jasa lain objek PPh Pasal 23
PP 9 Tahun 2022	PPh atas usaha jasa konstruksi
PP 34 Tahun 2017	PPh atas persewaan tanah dan bangunan
PMK 131 Tahun 2024	Dasar pengenaan PPN nilai lain
PMK 121 Tahun 2024	Pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara
UU 2 Tahun 2017	Jasa konstruksi

PP 22 Tahun 2020 jo PP 14 Tahun 2021	Klasifikasi usaha jasa konstruksi
UU 10 Tahun 2020	Bea meterai

Catatan penutup. Ketentuan perpajakan dapat berubah sewaktu waktu. Apabila terdapat perbedaan antara hasil aplikasi dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi acuan adalah ketentuan yang berlaku.